

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGURAN DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP PDRB DAN KEMISKINAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**Nyoman Ayu Putri Suastini<sup>1</sup>**

**Nyoman Djinar Setiawina<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: [putrisuastini26@gmail.com](mailto:putrisuastini26@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan di Provinsi Bali masih menjadi permasalahan bagi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan belanja modal terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, belanja modal dan PDRB terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) menganalisis pengaruh secara tidak langsung tingkat pendidikan, pengangguran dan belanja modal terhadap kemiskinan melalui PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) tingkat pendidikan dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, namun pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, (2) tingkat pendidikan dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, namun pengangguran dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, (3) PDRB memediasi hubungan tingkat pendidikan dan belanja modal terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, namun PDRB tidak memediasi hubungan pengangguran terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

**Kata kunci:** *tingkat pendidikan, pengangguran, belanja modal, PDRB dan kemiskinan.*

**ABSTRACT**

*Poverty is a problem in multidimensional development. Poverty is a complex problem related to various dimensions, namely social, economic, cultural, political as well as the dimensions of space and time. Poverty in the Province of Bali is still a problem for districts / cities in the Province of Bali. The objectives in this study are (1) to analyze the effect of education level, unemployment and capital expenditure on district / city GRDP in Bali Province, (2) analyze the influence of education level, unemployment, capital expenditure and GRDP on district / city poverty in Bali Province, and (3) indirectly analyze the level of education, unemployment and capital expenditure on poverty through regency / city GRDP in Bali Province. This research was conducted in districts / cities of Bali Province. This study uses secondary data with path analysis techniques. The results of this study stated that (1) the level of education and capital expenditure had a significant positive effect on GRDP of Regency / City in Bali Province, but unemployment had a significant negative effect on GRDP of Regency / City in Bali Province, (2) the level of education and capital expenditure had a significant negative effect to district / city poverty in Bali province, but unemployment and GRDP have a significant positive effect on district / city poverty in Bali Province, (3) GRDP mediates the relationship between education level and capital expenditure to district / city poverty in Bali province, but GRDP does not mediate the relationship unemployment towards poverty in Regency / City in Bali Province.*

**Keywords:** *education level, unemployment, capital expenditure, GRDP and poverty.*

## **PENDAHULUAN**

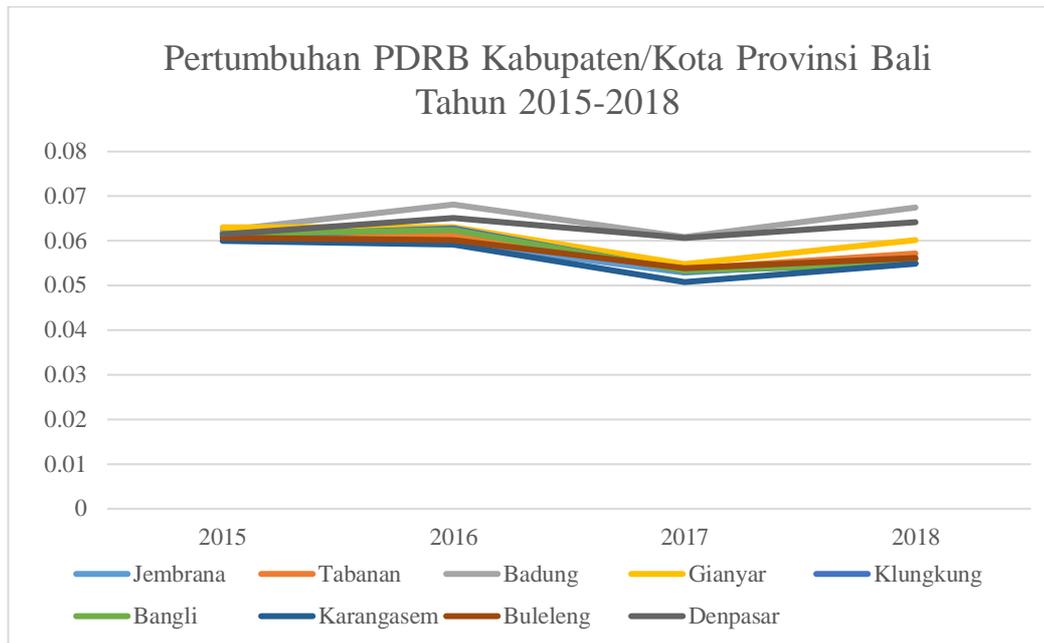
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmaraga, 2011). Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi dapat berupa perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Saraswati dan Ramantha, 2018).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bergantung pada pemanfaatan sektor-sektor potensial (Christianto Leasiwal, 2013). Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan melalui modal yang diproduksi serta modal manusia (Kurniawan dan Managi, 2018). Pemerintah harus memiliki tata pemerintahan yang baik agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Cooray, 2009). Kebijakan-kebijakan yang dibuat di Indonesia juga menjadi penyebab tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kebijakan yang memberikan tindakan redistributif yang tahan lama akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Niyimbanira, 2017). Penelitian Pardede dan Zahro

(2017), menyatakan bahwa Indonesia telah mampu mencapai stabilitas keuangan dan makroekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Ikeji (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan merangsang pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Lin dan Liu (2000) menunjukkan pemberian otonomi daerah memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur dari nilai PDRB dari suatu wilayah atau daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah (Sudiana, 2015). Gejala pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu PDRB, karena PDRB menggambarkan aktivitas perekonomian yang dapat dicapai pada satu periode (Wijayanti, 2014). Menurut Myanti (2013), PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan kecenderungan akan menurun.



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2019

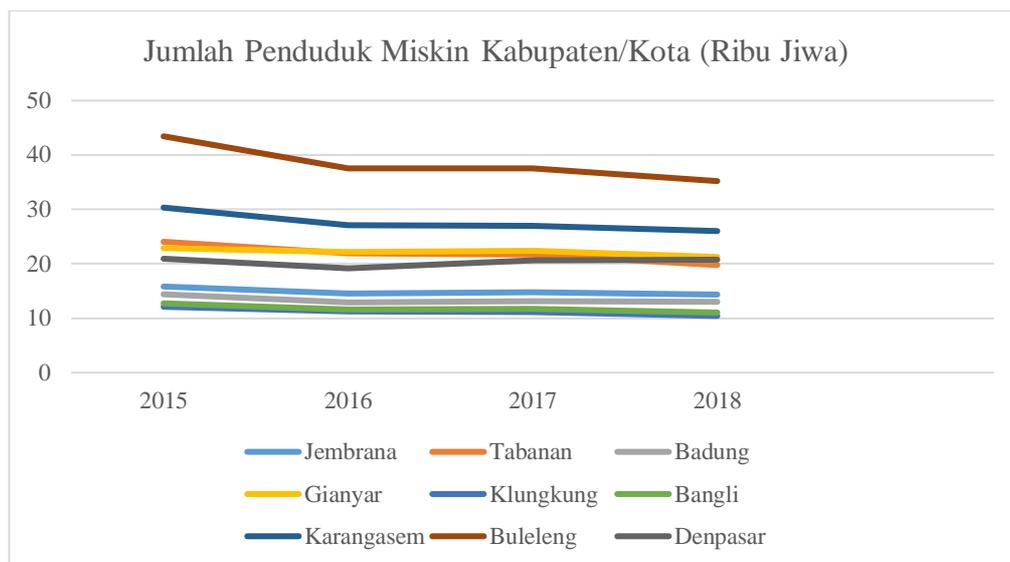
#### Grafik 1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2015-2018

Pada grafik 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Dalam data PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari pertumbuhan PDRB setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa factor dimana adanya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program penanggulangan kemiskinan beroperasi sesuai dengan kebijakan departemen terkait dan mereka tidak sepenuhnya terintegrasi (Nasution, 2015). Penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, penduduk miskin mempunyai sumber daya dalam jumlah

terbatas dan kualitas yang rendah, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas yang rendah berarti produktifitas menjadi rendah sehingga berpengaruh kepada upah yang diterima, dan adanya perbedaan akses dalam modal.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010).



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2019

### Grafik 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Berdasarkan Grafik 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Bali mengalami fluktuasi. Rata-rata jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Bali sudah menunjukkan penurunan jumlah, namun masih terdapat di beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi permasalahan kalsik

yang dihadapi setiap kabupaten/kota di Bali. Permasalahan kemiskinan di Provinsi Bali dipengaruhi oleh banyak faktor. Tingkat kemiskinan bisa dilihat dari beberapa faktor salah satunya adalah tingkat pendidikan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka perlu adanya pendalaman lebih lanjut mengenai kemiskinan, hal ini dilakukan guna mengurangi angka kemiskinan yang telah menjadi masalah klasik di Provinsi Bali.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Pendapatan yang besar diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang kemudian digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pada masing-masing daerah (serta mengurangi beberapa ketidakpuasan masyarakat di daerah bersangkutan) (Coulombe and Kathleen, 1999). Akita (2003) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya dan rendahnya kualitas transportasi di beberapa daerahnya. Berbagai program telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan namun, hal tersebut belum cukup untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi (Dariwardani, 2014), hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah tingkat pendapatan riil minimum (Budhi, 2013).

Menurut Kacem (2012) untuk mengurangi kemiskinan diperlukan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkurangnya ketimpangan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya belum tentu bisa

mengurangi kemiskinan secara efektif, hal ini dikarenakan jika peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pengurangan ketimpangan dan peningkatan faktor lainnya yang mendukung pengurangan kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berpengaruh apapun terhadap pengurangan kemiskinan.

Faktor lainnya yang menentukan kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan masa depan. Pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat besar, dimana pendidikan sendiri berhubungan dengan pembangunan karakter. Menurut Afzal (2012) pendidikan memiliki pengaruh dan manfaat yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan, selain itu peningkatan dalam kualitas pendidikan dan akses yang mudah dalam memperoleh pendidikan. Menurut Anderson (2012) tingkat pendidikan yang memadai akan memperbesar kesempatan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Terdapat hubungan yang kuat antara pendidikan dan kemiskinan, dimana melalui pendidikan dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan kemiskinan dapat membatasi akses terhadap pendidikan (Pokharel, 2015).

Penurunan pengangguran diharapkan juga mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2008). Penurunan pengangguran diharapkan juga mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Selain

itu, menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara apabila rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar dalam hidup yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Menurut Verner (2006) kemiskinan merupakan rumah tangga yang kurang berpendidikan. Rumah tangga yang tidak miskin adalah mereka yang pendapatannya berada diatas garis kemiskinan (Khrisna *et al*, 2007).

Belanja modal yang meningkat diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih baik karena aset tetap daerah yang meningkat merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah hasil dari pengeluaran belanja modal. Belanja modal dalam wujud aset tetap seperti infrastruktur sangat penting untuk menunjang pemerataan distribusi pendapatan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Okafor *et al*. (2012), juga berpendapat bahwa adanya infrastruktur berkualitas maka produktivitas juga akan meningkat. Dalam mengelola belanja modal ini pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Pertumbuhan ekonomi yaitu mengeluarkan belanja pemerintah dengan efektif untuk menopang aktivitas perekonomian seperti pembangunan sarana

prasarana publik, selain itu dengan tepatnya mengalokasikan belanja pemerintah maka diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian Utami dan Indrajaya (2019), menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Faktanya yang terjadi dilapangan adalah penurunan belanja modal di beberapa daerah di Provinsi Bali tidak diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan belanja modal terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, belanja modal dan PDRB terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) menganalisis pengaruh secara tidak langsung tingkat pendidikan, pengangguran dan belanja modal kemiskinan melalui PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kausal dari tahun 2014-2018. Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2015:128). Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2014-2018. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali dengan menggunakan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistika (BPS)

dan dinas yang terkait dengan obyek penelitian. Obyek penelitian adalah himpunan sebuah elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan kajian pada lima variabel utama yaitu tingkat pendidikan, pengangguran, belanja modal, PDRB dan kemiskinan.

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, pengangguran dan belanja modal, variabel mediasi yaitu PDRB, dan variabel terikat yaitu kemiskinan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain atau media perantara seperti dokumen (Sugiyono, 2014:193). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, pengangguran, belanja modal, PDRB dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Provinsi Bali dan literatur-literatur lain yang mendukung tentang objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan cara observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah observasi yang hanya mengumpulkan data yang telah tersedia oleh badan atau lembaga tertentu, dimana peneliti tidak terlibat langsung (Sugiyono, 2015:247). Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari uraian dari buku buku, karya ilmiah seperti skripsi, artikel, dan dokumen.

Teknik analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis jalur (*path analysis*). Tujuan dari analisis jalur adalah memprediksi kebermaknaan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya, serta adanya pengaruh tidak langsung. Dengan

menggunakan analisis jalur, maka dapat dihitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel. Koefisien jalur adalah *standardized* koefisien regresi. Koefisien jalur diperoleh dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dalam penelitian ini, dua persamaan tersebut adalah :

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

$X_1$  : Tingkat Pendidikan

$X_2$  : Pengangguran

$X_3$  : Belanja Modal

$Y_1$  : PDRB

$Y_2$  : Kemiskinan

$\beta_1 - \beta_7$  : Koefisien jalur untuk masing-masing variabel

$e_1, e_2$  : Kesalahan residual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Daerah Penelitian

Provinsi Bali berada diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang terletak diantara koordinat 08°03'40, - 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" — 115°42'40" Bujur Timur. Hal tersebut yang menyebabkan Provinsi Bali beriklim tropis sama seperti provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Batas-batas Provinsi Bali antara lain sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Pulau Bali adalah bagian dari kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km dan sekitar 3,2 km dari pulau jawa. Selain itu, Provinsi Bali juga terdiri dari beberapa pulau yaitu Pulau

Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), dan Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas sebesar 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,23 persen) dari luas Provinsi Bali yang diikuti oleh Kabupaten Jembrana sebesar 841,40 km<sup>2</sup> (14,93 persen), Karangasem sebesar 839,54 km<sup>2</sup> (14,89 persen), dan Tabanan 839,33 km<sup>2</sup>. Sisanya berturut-turut adalah Bangli sebesar 520,81 km<sup>2</sup>, Badung sebesar 418,52 km<sup>2</sup>, Gianyar sebesar 368,00 km<sup>2</sup>, Klungkung sebesar 315 km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar sebesar 127,78 km<sup>2</sup>, sehingga total luas Pulau Bali sebesar 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan diantara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yakni Gunung Agung yang merupakan titik tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur (1.717 meter) yang berlokasi di Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sekitar 30.000 tahun lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi, sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2 persen) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15 persen) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40 persen) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (> 40 persen) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungaisungai, seperti sungai Tukad Ayung 62.500 meter dan sungai-sungai lainnya.

### **Hasil Analisis Jalur**

Analisis jalur merupakan perluasan penerapan analisis regresi linear berganda untuk memprediksi hubungan sebab akibat antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independent terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung melalui variabel intervening.

Dalam penelitian ini, pengaruh langsung terjadi antara variabel Tingkat Pendidikan (X1), Pengangguran (X2) dan, Belanja Modal (X3) terhadap PDRB (Y1) serta pengaruh tidak langsung terjadi antara variabel Tingkat Pendidikan (X1), Pengangguran (X2), Belanja Modal (X3), dan PDRB (Y1) terhadap Kemiskinan (Y2). Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan SPSS, maka

dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Hasil analisis jalur disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Ringkasan Hasil Analisis Jalur**

Hubungan Variabel	Standardized Coefficients	Std. Error	Probability t	Keterangan
X <sub>1</sub> → Y <sub>1</sub>	0,647	51,500	0,000	Signifikan
X <sub>2</sub> → Y <sub>1</sub>	-0,179	192,716	0,024	Signifikan
X <sub>3</sub> → Y <sub>1</sub>	0,369	3,023	0,000	Signifikan
X <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	-1,080	0,346	0,000	Signifikan
X <sub>2</sub> → Y <sub>2</sub>	0,246	0,000	0,008	Signifikan
X <sub>3</sub> → Y <sub>2</sub>	-0,352	0,028	0,000	Signifikan
Y <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	1,216	2,906	0,000	Signifikan

Sumber: Lampiran 3, 2019

Keterangan :

- X<sub>1</sub> = Tingkat Pendidikan
- X<sub>2</sub> = Pengangguran
- X<sub>3</sub> = Belanja Modal
- Y<sub>1</sub> = PDRB
- Y<sub>2</sub> = Kemiskinan

Dari ringkasan hasil analisis jalur yang ditunjukkan pada Tabel 1 dapat dinyatakan persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan struktural pertama adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = 0,647X_1 - 0,179X_2 + 0,369X_3$$

S.E = (51,500) (192,716) (3,023)  
 t hitung = (7,573) (-2,347) (4,326)  
 Sig. = (0,000) (0,024) (0,000)  
 R<sup>2</sup> = 0,765  
 F = 44,502  
 Prob. F = 0,000

Persamaan struktural kedua adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = -1,080X_1 + 0,246X_2 - 0,352X_3 + 1,216Y_1$$

S.E = (0,346) (0,000) (0,028) (2,906)  
 t hitung = (-16,777) (2,787) (-4,000) (11,923)  
 Sig. = (0,000) (0,008) (0,000) (0,000)  
 R<sup>2</sup> = 0,927  
 F = 127,305  
 Prob. F = 0,0000

Untuk mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah varian variabel PDRB ( $Y_1$ ) yang tidak dijelaskan oleh Tingkat Pendidikan ( $X_1$ ), Pengangguran ( $X_2$ ) dan Belanja Modal ( $X_3$ ), maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,765^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,585225} \\ &= \sqrt{0,414775} \\ &= 0,6440 \end{aligned}$$

Nilai kekeliruan standar  $e_1$  yang diperoleh sebesar 0,6440 yang artinya 64,4 persen variansi PDRB tidak dapat dijelaskan oleh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Belanja Modal.

Untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan jumlah varian variabel Kemiskinan ( $Y_2$ ) yang tidak dijelaskan Tingkat Pendidikan ( $X_1$ ), Pengangguran ( $X_2$ ), Belanja Modal ( $X_3$ ), serta PDRB ( $Y_1$ ) maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,927^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,859329} \\ &= \sqrt{0,140671} \\ &= 0,3750613 = 0,3751 \end{aligned}$$

Nilai kekeliruan standar  $e_2$  yang diperoleh sebesar 0,3751 yang artinya 37,51 persen variansi Kemiskinan tidak dapat dijelaskan oleh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Belanja Modal dan PDRB.

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total yang dapat dihitung sebagai berikut.

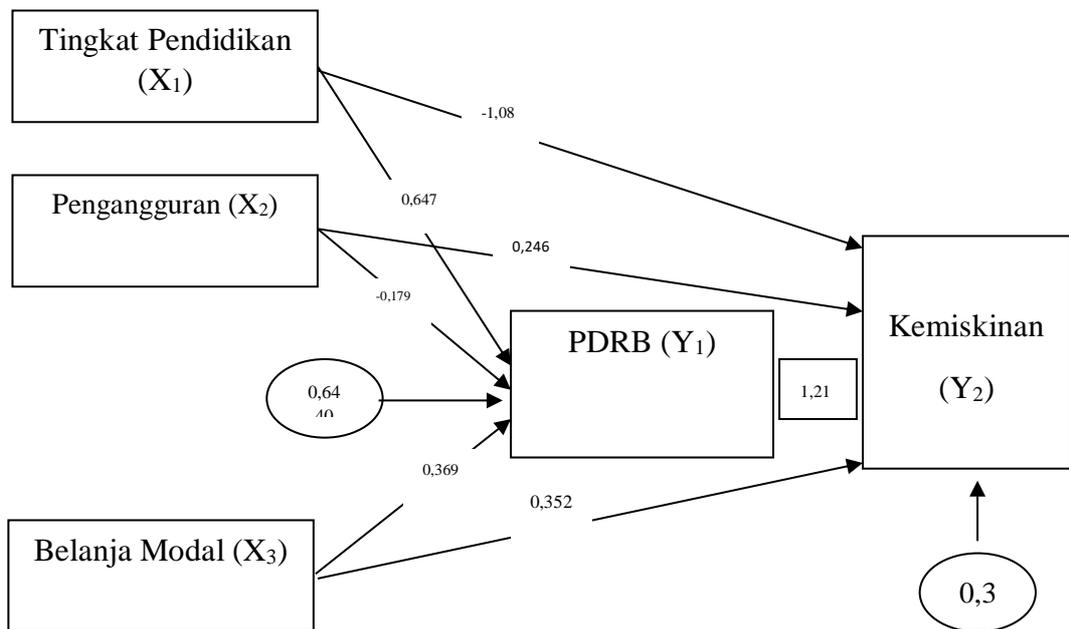
$$\begin{aligned}
 R^2_m &= 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2 \\
 &= 1 - (0,6440)^2 - (0,3751)^2 \\
 &= 1 - (0,414736) - (0,14070001) \\
 &= 1 - (0,10583533593) \\
 &= 0,941646641 = 0,9416
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$R^2_m$  = Koefisien determinasi total

$e_1, e_2$  = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh hasil sebesar 0,9416 yang memiliki arti bahwa 94,16 persen variasi kemiskinan dipengaruhi oleh variasi tingkat pendidikan, pengangguran, belanja modal dan PDRB, sisanya yaitu sebesar 5,84 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model tersebut.



Gambar 1 Diagram Hasil Analisis Jalur

- 1) Pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000. Dengan demikian maka  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,647 dan nilai tidak signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sulistyaningrum (2014), menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap PDRB di Kota Surabaya. Namun penelitian yang dilakukan Suriani dan Amari (2010) menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi PDRB per kapita. Terdapat faktor lain yang menyebabkan adanya perbedaan hasil penelitian seperti pemilihan objek penelitian dan lain sebagainya. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang keadaan ekonomi dan sosialnya rendah sehingga pendidikan akan sangat mempengaruhi PDRB per kapita Provinsi Bali. Keadaan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya Pendidikan di Provinsi Bali yang terbilang meningkat setiap tahunnya menyebabkan tingkat Pendidikan mampu mempengaruhi PDRB per kapita Provinsi Bali.

## **2) Pengaruh langsung pengangguran terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ , ini berarti  $H_1$  diterima dan  $H_0$

ditolak. Ini berarti pengangguran berpengaruh negatif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengangguran memiliki koefisien jalur sebesar -0,179 dan nilai signifikansi sebesar  $0,0000 < 0,05$  maka pengangguran berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini berarti pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Soekarnoto (2014) yang menyatakan bahwa penurunan tingkat pengangguran akan meningkatkan PDRB per kapita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB. Hal ini disebabkan oleh peningkatan PDRB pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, industri pengolahan dan lain sebagainya. Diantara sektor tersebut terdapat sektor unggulan di Provinsi Bali yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak antara lain adalah sektor pariwisata, sektor hotel dan restoran, sektor transportasi.

### **3) Pengaruh langsung belanja modal terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ , ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini berarti belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,365 dan nilai signifikansi sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini berarti belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil pada penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alexiou (2009) dan Putra (2016) yaitu belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa jika belanja modal naik maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Modal dasar melakukan aktivitas ekonomi yaitu sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi, maka dari itu untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang optimal yaitu dengan pengalokasian anggaran belanja yang tepat sasaran.

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Menurut Afia (2010) kenaikan belanja modal selalu terjadi dari tahun ke tahun disebabkan karena rencana belanja modal dalam waktu jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini disebabkan perubahan perekonomian pada daerah tersebut juga mengalami peningkatan, sedangkan PDRB di daerah bisa kemungkinan tidak mengalami peningkatan atau tetap jika pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut masih tetap atau tidak mengalami peningkatan. Dalam penelitian Utami dan Indrajaya (2019), belanja modal dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah mempunyai

pengaruh yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dapat bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan memiliki sifat produktif sehingga dapat menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan.

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi suatu negara dibentuk dari tiga unsur yaitu sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia dan akumulasi modal yang dimiliki (Arsyad, 2010:75). Menurut Rostow dan Musgrave (Mangkoesobroto, 1993:169) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pemerintah daerah membangun sarana dan prasarana yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipicu dengan semakin banyaknya infrastruktur dan perbaikannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Nugroho, 2010).

Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, besaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dimana belanja modal termasuk dalam salah satu bagian dari pengeluaran pemerintah.

#### **4) Pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 .Nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ , ini berarti  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -1,080 dan nilai signifikansi sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masood S. Awan dan Muhammad Waqas (2011), yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian ini juga menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka kemungkinan untuk menjadi golongan non-miskin meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seruni (2014) variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ini berarti peningkatan pendidikan akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin.

Menurut Purnami dan Saskara (2016) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten /kota di Provinsi Bali. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuliarmi (2013) yang menyimpulkan bahwa pendidikan akan menurunkan kemiskinan sehingga diperlukan adanya bantuan sosial di bidang pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan pendidikan memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan.

##### **5) Pengaruh langsung pengangguran terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,008. Nilai probabilitas sebesar  $0,008 < 0,05$ , ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Ini berarti pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali..

Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,246 dan nilai signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pengangguran sebesar satu juta jiwa, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,246 juta jiwa dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus (2018) bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran terbuka bertambah, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Penelitian ini mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya dan konsisten dengan hasil penelitian Aristina dkk. (2017), Soejoto dan Karisma (2013), Wirawan dan Arka (2015), Yanthi dan Marhaeni (2015), Megasari, dkk. (2015), Nugroho (2015), yang memperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2013) yang memperoleh hasil bahwa secara langsung pengangguran terbuka berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurut penulis, hal ini terjadi karena dari hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

**6) Pengaruh langsung belanja modal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , ini berarti  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,352 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan belanja modal sebesar 1 miliar rupiah, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,352 juta jiwa dengan asumsi variable lain dianggap konstan.

Penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Ezra (2017), Hasan dan Zikriah (2009). menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal memberi dampak positif terhadap penduduk miskin di Aceh, karena ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan dampak positif dari peningkatan belanja modal pemerintah dan akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yg dilakukan oleh Mukarramah (2019) yaitu belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

**7) Pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , ini berarti

$H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

PDRB memiliki koefisien jalur sebesar 1,216 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil ini penelitian ini memperjelas bahwa ada beberapa faktor- faktor lain yang dapat menyebabkan PDRB meningkat tidak mengurangi jumlah penduduk miskin. Adapun faktor- faktor tersebut seperti ketimpangan distribusi pendapatan dan teknologi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Besley dan Burgess (2003) serta Janjua dan Kamal (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita mempengaruhi kemiskinan. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan semakin banyaknya output yang tercipta dan mengindikasikan semakin banyak jumlah orang yang bekerja. Sehingga, akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

**8) Pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{b_7^2 S_{b_1}^2 + b_1^2 S_{b_7}^2}$$
$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{(34,651)^2 (51,500)^2 + (389,985)^2 (2,906)^2}$$
$$S_{\beta_1\beta_7} = 2113,976249$$

Menghitung nilai z (t-hitung) :

$$z = \frac{\beta_1\beta_9}{S_{\beta_1\beta_9}}$$
$$z = \frac{(389,985)(34,651)}{2113,976249}$$
$$z = 6,392394 = 6,39$$

Keterangan :

- $S_{\beta_1\beta_7}$  : besarnya standar error tidak langsung
- $S_{\beta_1}$  : *Standard error* $\beta_1$
- $S_{\beta_7}$  : *Standard error* $\beta_9$
- $\beta_1$  : jalur X1 terhadap Y1
- $\beta_7$  : jalur Y1 terhadap Y2
- $\beta_1\beta_7$  : jalur X1 terhadap Y1( $\beta_1$ ) dengan jalur Y1 terhadap Y2( $\beta_7$ )

Oleh karena  $Z_{hitung}$  (6,39) lebih besar dari  $Z_{tabel}$  (1,96) hal ini berarti  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui PDRB, diartikan variabel PDRB merupakan variabel mediasi dalam pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**9) Pengaruh tidak langsung pengangguran terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{b_7^2 S_{b_2}^2 + b_2^2 S_{b_7}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{(34,651)^2(192,716)^2 + (-452,329)^2(2,906)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = 6805,943536$$

Menghitung nilai z (t-hitung) :

$$z = \frac{\beta_2\beta_7}{S_{\beta_2\beta_7}}$$

$$z = \frac{(34,651)(-452,329)}{6805,943536}$$

$$z = -2,302$$

Keterangan :

- $S_{\beta_2\beta_7}$  : besarnya standar error tidak langsung
- $S_{\beta_2}$  : *Standard error* $\beta_2$
- $S_{\beta_7}$  : *Standard error* $\beta_9$
- $\beta_2$  : jalur X2 terhadap Y1
- $\beta_7$  : jalur Y1 terhadap Y2
- $\beta_2\beta_7$  : jalur X2 terhadap Y1( $\beta_2$ ) dengan jalur Y1 terhadap Y2( $\beta_9$ )

Oleh karena  $Z_{hitung}$  (-2,302) lebih kecil dari  $Z_{tabel}$  (-1,96) hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dengan demikian, pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui PDRB, diartikan variabel PDRB bukan merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**10) Pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali,**

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{b_7^2 S_{b_3}^2 + b_3^2 S_{b_7}^2}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{(34,651)^2 (3,023)^2 + (13,078)^2 (2,906)^2}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = 111,4311$$

Menghitung nilai z (t- hitung) :

$$z = \frac{\beta_3\beta_7}{S_{\beta_3\beta_7}}$$

$$z = \frac{(13,078)(34,651)}{111,4311969}$$

$$z = 4,06677$$

Keterangan :

$S_{\beta_3\beta_7}$  : besarnya standar error tidak langsung

$S_{\beta_3}$  : *Standard error* $\beta_3$

$S_{\beta_7}$  : *Standard error* $\beta_9$

$\beta_3$  : jalur X3 terhadap Y1

$\beta_7$  : jalur Y1 terhadap Y2

$\beta_3\beta_7$  : jalur X3 terhadap Y1( $\beta_3$ ) dengan jalur Y1 terhadap Y2( $\beta_9$ )

Oleh karena  $Z_{hitung}$  (4,06677) lebih besar dari  $Z_{tabel}$  (1,96) hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dengan demikian, belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui PDRB, diartikan variabel PDRB merupakan variabel mediasi dalam pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tingkat Pendidikan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 2) Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 3) Tingkat Pendidikan dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 4) Pengangguran dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 5) PDRB memediasi hubungan tingkat Pendidikan dan belanja modal terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 6) PDRB tidak memediasi hubungan Pengangguran terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas antara lain sebagai berikut.

- 1) Untuk mengurangi kemiskinan diperlukan perbaikan dalam kualitas dan akses dalam pendidikan agar mampu mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu pemerintah dapat lebih memperhatikan misalkan dalam hal pendidikan seperti program wajib belajar sembilan tahun dan dana bantuan oprasional sekolah yang sudah sudah tidak asing lagi keberadaannya namun perlu

diawasi pendistribusiannya agar tidak tersendat dan agar tidak disalahgunakan peruntukannya.

- 2) Untuk mengurangi kemiskinan diperlukan perbaikan dalam kualitas dan akses dalam belanja modal. Pemerintah daerah maupun pusat, diharapkan mampu lebih berani, matang dan tepat waktu dalam penyusunan maupun merealisasikan anggaran. Belanja modal disini dapat berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Dengan perbaikan infrastruktur dll ini diharapkan pendidikan lebih menjangkau seluruh pelosok negeri dan mengurangi ketimpangan SDM. Semakin tinggi kualitas SDM nantinya mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

## REFERENSI

- Adi Parwa, I. G. N. J. L., & Murjana Yasa, I. G. W. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan EKonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(5), 945–973.
- Afzal, Muhammad, Muhammad Ehsan Malik, Ishrat Begum, Kafeel Sarwar, dan Hina Fatima. 2012. Relationship Among Education, Poverty, and Economic Growth in Pakistan : An Econometric Analysis. *Journal of Elementary Education*, 22(1), pp :23-45
- Agus Adi Putra, I Komang dan Sudarsana Arka. 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.7, No.3, pp. 416-444.
- Akita, Takahiro. 2003. “Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method.” *The Annal of Regional science* No. 37, P. 55-77.
- Alexiou, Constantinos. (2009). *Government Spending and Economic Growth*:

- Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE).  
*Journal of Economic and Social Research*, 11 (1), 1-16.
- Anderson, Courtney Lauren. 2013. Opening Doors: Preventing Youth Homelessness Through Housing and Education Collaboration. *Seattle Journal for Social Justice*, 11(2), pp : 457-522
- Anugrahita Dewi, I.G.A.M.D dan Ni Luh Karmini. 2012. Dampak Perbedaan Pendapatan Pekerja Perempuan Sektor Informal Di Desa Marga. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.2, No.1, pp, 1-9.
- Aristina, Ita. Budhi, Made Kembar Sri. Wirathi, I G. A. P. Darsana, Ida Bagus.  
2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Volume 6, No.5. Hal: 677-704
- Awan, Masood S., dan Muhammad Waqas. 2011. Impact of Education on Poverty Reduction. *International Journal of Academic Research*, 1 (3) : h: 659-664.
- Besley, T. dan Burgess, R. 2003. Halving Global Poverty. *Journal of Economic Perspectives*, 17 (3) : h: 3-22.
- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali : Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 6 [1]: 1-6
- Christianto Leasiwal, T. (2013). The Analysis of Indonesia Economic Growth: a Study in Six Big Islands in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy* |Ventura, 16 (1), 1-12.
- Cooray, Arusha. 2009. Government expenditure, governance and economic growth. [www.palgrave-journals.com/ces/.51](http://www.palgrave-journals.com/ces/.51): 401-418.
- Coulombe, Sarge & Kathleen M. Day. 1999. Economic Growth and Regional Income Disparities in Canada and The Northern United States. *Journal. Department of Economics. University of Pttawa*. Vol. XXV, NO. 2.
- Dariwardani, Ni Made Inna (2014). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) Di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7 [1] : 7-15
- Diah Paramita, AA Istri dan Purbadharmaja. 2015. Pengaruh Investasi dan pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E- Jurnal EP Unud*, 4(10), 1194-1218.
- Ikeji, Chibueze C. 2011. Politics of revenue of policy and strategic studies, 1(1), pp: 121-136.
- Janjua, Zamurrad P., dan Kamal, Usman A. 2011. The Role of Education and Income in Poverty Alleviation: A Cross-Country Analysis. *The Lahore Journal of Economics*. 16 (1) : h: 143-172.
- John, O.Aiyedogbon. 2012. Povertyband Youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011. *International Journal of Business and Social Science*.

- Kacem, Rami Ben Haj. 2012. Monetary versus Non-Monetary Pro-Poor Growth : Evidence from Rural Ethiopia between 2004 and 2009. *Economics Discussion Papers*. No 20-62
- Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 339–361.
- Myanti Astrini A. Ni Made. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), 384-392.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal decentralization and economic growth in china. *Economic development and cultural change*. Chicago. Vol. 49, pp: 263-275.
- Nasution, Ahmadriswan. 2015. The Role of Social Capital on Rural Household Poverty Reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 46, No 6,5 October 2015 page 122
- Niyimbanira, F. (2017). Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 254–261.
- Oka Artana Yasa, I Komang dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.8, No.1, pp. 63-71.
- Okafor, R. G., Onwumere, J. U. J., & Ibe, I. G. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria ' s Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4(19), 66–75.
- Pardede, R., & Zahro, S. (2017). Saving not spending: Indonesia's domestic demand problem. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 233–259. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1434928>
- Pokharel, Trilochan. 2015. Poverty in Nepal: *Characteristics and Challenges*. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 11, pp.44-56
- Purnama Yanti, C.I.D dan A.A.I.N, Marhaeni. 2015. Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *PIRAMIDA*. Vol. 11, No. 2, pp. 68-75.
- Purnami, Ni Made Sasih dan Ida Ayu Nyoman Saskara. 2016. Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal EP unud*. Vol.5 No.11, pp. 1188-1218
- Putri, I.A. Mega Septyana dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Ptovensi Bali. *E-Jurnal EP unud*. Vol.2 No.10, pp.441-448
- Sedana Putra, I Made dan I Ketut Sudibia. 2018. Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi Dan Demografi Terhadap Pendapatan Usaha Sektor Informal Di Desa Darmasaba., [S.L.], *PIRAMIDA* Vol.14, No.1, pp. 49 - 58.
- Seruni Sudiharta, Putu dan Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di

- Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3, No. 10, pp. 431-39.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. Universitas Timor (Unimor) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 10* [1] 59-71.
- Sudiana, I Wayan. (2015). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Struktur Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(6), 608-745.
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E- Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
- Wirawan, I Made Tony. Arka, Sudarsana. 2015. Analisis Pengaruh Pendidikan, Pdrb Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Udayana*. Vol.4, No.5.
- Yanthi, Cokorda Istri Dian Purnama dan Marhaeni, A. A. I. N. 2015. Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.